

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi masyarakat untuk tinggal ataupun bekerja di DKI Jakarta karena DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini membuat DKI Jakarta menjadi tujuan utama urbanisasi sehingga jumlah penduduk di terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan, salah satunya adalah berkurangnya ruang terbuka dan area bermain untuk anak-anak karena banyaknya fenomena alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan infrastruktur. Adanya pembangunan-pembangunan tersebut sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kota Jakarta sebagai ibukota dan pusat ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, wilayah DKI Jakarta menduduki posisi teratas sebagai provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dengan angka mencapai 16.165 orang per kilometer persegi dan dengan jumlah total penduduk di Provinsi DKI sebanyak 11,135 juta orang.

Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta hanya mencapai 5,2% pada tahun 2023. Angka tersebut sangat jauh di bawah standar ideal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 sebesar 30%. Dari jumlah

tersebut, hanya sebagian kecil yang dialokasikan sebagai taman bermain atau ruang publik yang ramah anak. Fenomena alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur lainnya terus berlangsung secara masif di Jakarta. Meskipun demikian, pembangunan tersebut seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas bermain yang memadai bagi anak-anak. Akibat dari kurangnya ruang publik yang ramah untuk anak banyak anak terpaksa bermain di gang-gang sempit, jalan raya, rel kereta api, hingga bantaran sungai yang tentu saja dapat membahayakan keselamatan anak-anak tersebut terutama di kawasan pemukiman padat penduduk terutama di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya memenuhi hak-hak anak yang diawali oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menerbitkan regulasi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia dalam rangka pemenuhan hak anak yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan ini menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dipenuhi oleh

semua pihak baik itu dari orang tua, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah dan negara.

Kota Layak Anak (KLA) sebagai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Salah satu bentuk perwujudan pemenuhan indikator KLA dalam penyediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik maka, didirikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang telah memenuhi aspek keamanan serta keselamatan anak. RPTRA hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak di wilayah perkotaan, terutama di kawasan padat penduduk. Pembangunan RPTRA dimulai pada tahun 2015 yang dirancang sebagai ruang publik multifungsi yang dapat memenuhi hak anak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, dan mengembangkan diri di ruang publik. Hingga tahun 2023, tercatat terdapat 324 RPTRA telah dibangun di berbagai wilayah Jakarta.

Tabel 1. 1 Jumlah RPTRA Dari Tahun 2015-2023

No.	Tahun	Jumlah RPTRA	Persentase
1	2017	188	58,02%
2	2018	289	89,20%
3	2019	319	98,46%
4	2020	322	99,38%
5	2021	323	99,69%
6	2022	323	99,69%

7	2023	324	100%
---	------	-----	------

Sumber: <https://pkk.jakarta.go.id/>

Data RPTRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat jumlah pengelola RPTRA sebanyak 1.924 orang. Persebaran jumlah anggota pengelola RPTRA masing-masing RPTRA rata-rata memiliki setidaknya enam orang pengelola yang memiliki tugas untuk kegiatan memelihara dan merawat kawasan ruang publik tersebut seperti pemasangan dan pembayaran telepon, air, dan listrik, pembayaran internet, pemeliharaan sarana dan prasarana, ATK, dan operasional, perkantoran, pengamanan, kebersihan, dan jasa pengelola.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu contoh perwujudan komitmen untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak melalui penyediaan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak-anak dengan membenahi kawasan Kalijodo yang dahulunya dikenal sebagai kawasan lokalisasi kini telah bertransformasi menjadi RPTRA dan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo dimulai pada bulan September 2016 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 2017 yang diusung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan didukung oleh pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Sinarmas Land.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan

aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Kota Layak Anak. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan ruang publik yang dapat digunakan sebagai wadah yang dapat menggerakkan anak untuk dapat beraktivitas di luar ruangan (Rizani et. Al., 2017). RPTRA dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung untuk perkembangan anak, tak hanya itu fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari seluruh kalangan untuk dapat melakukan kegiatan di ruang publik tersebut.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada Pasal 8 Pengorganisasian pada RPTRA terdiri dari 3 organisasi dalam pengelolaan RPTRA secara keseluruhan. Tiga organisasi tersebut meliputi Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi, Tim Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan. Selain itu pengelolaan RPTRA Kalijodo juga melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan partisipasi dari masyarakat sekitar kawasan RPTRA Kalijodo. Beberapa OPD yang terkait dengan pengelolaan RPTRA Kalijodo memiliki tugas untuk merancang setiap program yang akan dilaksanakan di RPTRA Kalijodo serta melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di RPTRA Kalijodo.

Tim Pelaksana Tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan memastikan pengelolaan RPTRA berjalan sesuai dengan prinsip Kota Layak Anak. Tim Pelaksana Tingkat

Kelurahan memiliki peran dalam pengelolaan RPTRA di tingkat lapangan termasuk dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengelola RPTRA peran penting dalam mendukung keberjalanan keseharian RPTRA Kalijodo berperan memberikan pelayanan dan informasi kepada setiap pengunjung dan mengatur jadwal kegiatan-kegiatan serta memfasilitasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan di RPTRA Kalijodo. Selain itu, terdapat kelompok aktif pengguna RPTRA Kalijodo melibatkan Tim Penggerak PKK Kelurahan Angke, MI Al-Khaeriyah, dan Sanggar Maksima yang aktif menggunakan RPTRA dalam berbagai kegiatan. Adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat membuat RPTRA Kalijodo dikelola dengan optimal serta dapat berfungsi sebagai fasilitas publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya memenuhi kebutuhan anak-anak dalam kebebasan bermain.



Gambar 1. 1 Kondisi Awal RPTRA Pasca Pembangunan
Sumber gambar: YouTube.com Jakarta Smart City (2017)

RPTRA Kalijodo dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak. Beberapa fasilitas yang terdapat di

RPTRA Kalijodo antara lain: area bermain anak, *skate park*, area *jogging*, perpustakaan, toilet, mushola, taman hijau dan area tanaman obat keluarga, pos kesehatan, area PKK *Mart*, lapangan futsal mini, area parkir hingga penyediaan posko pengaduan terhadap kekerasan anak dan perempuan yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak yang berada di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. RPTRA Kalijodo juga meraih prestasi gemilang pada tahun 2019 dengan memperoleh sertifikasi nasional Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan berhasil menjadi peringkat pertama dari 30 kabupaten/kota se-Indonesia dengan mencapai nilai sebesar 451. Nilai tersebut diraih setelah tim audit lapangan Kementerian PPPA menilai bahwa fasilitas dan pelayanan yang tersedia di RPTRA Kalijodo telah memenuhi standar nasional.



Gambar 1. 2 Kondisi RPTRA Kalijodo

Namun, pada bulan Mei 2025 dilaporkan mengalami kerusakan dan RPTRA Kalijodo tidak seramai ketika baru diresmikan hal ini disebabkan adanya kondisi RPTRA Kalijodo terlihat terbengkalai yang ditandai dengan adanya retakan di dinding bangunan RPTRA, atap yang bocor, lukisan mural yang semakin memudar warnanya serta arena *skateboard* yang permukaannya sudah berlubang di beberapa bagian. Kondisi ini tidak hanya mengurangi nilai estetika kawasan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengunjung.



Gambar 1. 3 Kerusakan Pada Fasilitas RPTRA
Sumber Gambar: Kompas.com, 2023

Retakan yang terdapat pada dinding RPTRA dapat membahayakan masyarakat karena dinding yang retak akan berpotensi roboh. Hal ini menjadi sebuah ancaman terhadap keselamatan anak-anak dan pengunjung lain yang ingin menggunakan fasilitas tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan rutin dan pengelolaan yang berkelanjutan dibutuhkan untuk

menjaga fungsi dan keamanan fasilitas yang terdapat di RPTRA Kalijodo. Keberlanjutan dari pengelolaan RPTRA Kalijodo sangat bergantung pada pelaksanaan dan dukungan dari semua pihak-pihak yang terlibat meliputi sistem pengelolaan, perawatan fasilitas, dukungan dari masyarakat setempat, dan peran pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan RPTRA Kalijodo. Minimnya pemeliharaan dan lemahnya sistem pengelolaan RPTRA Kalijodo menunjukkan bahwa keberlanjutan dari pengelolaan sarana dan prasarana belum berjalan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan adanya organisasi formal yang memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengelolaan RPTRA Kalijodo. Meskipun terdapat keberadaan Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora namun, masih adanya permasalahan dalam RPTRA Kalijodo menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora belum berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 123. Selain itu, adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan informasi penggunaan sarana RPTRA menunjukkan pemberian informasi & edukasi yang dilakukan oleh pengelola RPTRA belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pengguna RPTRA. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Bagaimana pengelolaan dan peran para *Stakeholder* dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta?”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka ditemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan kualitas prasarana RPTRA Kalijodo.
2. Pemanfaatan RPTRA yang tinggi tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai.
3. Ketidakseimbangan peran antar *Stakeholder* sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengelolaan rutin.

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berfungsi sebagai ukuran dari tujuan penelitian yang dinilai dengan mempertimbangkan latar belakang, pernyataan masalah, dan tujuan penelitian dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang peran *Stakeholders* dalam organisasi, khususnya dalam konteks RPTRA. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori administrasi publik dalam hal manajemen *Stakeholders* dan pengambilan keputusan secara kolektif. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan teoritis baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan ruang publik, khususnya dari perspektif keterlibatan pemangku kepentingan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan keberlanjutan fasilitas publik.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan identifikasi pada sistem pengelolaan yang RPTRA Kalijodo.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang publik.

1.6. Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan dan dimanfaatkan sebagai dasar

perbandingan serta penguatan kerangka teori (Sugiyono, 2018). Penelitian terdahulu difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang *Peran Stakeholders*.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti-Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Jagad Febrian Putra, Titik Djumiarti, Tri Yuniningsih - 2025	Mengkaji siapa saja stakeholder yang terlibat, bagaimana perannya, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan RTH Hutan Kota Bekasi.	Teori stakeholder R. Edward Freeman	Pendekatan Kualitatif Deskriptif.	Dinas Lingkungan Hidup sebagai stakeholder kunci, masyarakat sebagai stakeholder primer, serta instansi teknis lain sebagai stakeholder sekunder. Pengelolaan belum maksimal karena komunikasi antar-stakeholder kurang dan kerja sama dengan pihak non-pemerintah lemah.	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan RTH Hutan Kota Bekasi secara umum, sedangkan peneliti penulis secara spesifik mengkaji pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA dengan menekankan integrasi peran <i>stakeholders</i> dalam konteks ruang publik ramah anak.
2.	Yhani Chrismawati dan R. Widodo Dwi Pramono, 2021	Mengidentifikasi Stakeholder yang paling berpengaruh dalam pengembangan Agrowisata Minapadi Semberembe, serta menganalisis peran masing-	Teori Stakeholder Mapping menurut Reed et al (2009).	Pendekatan Deskriptif Kualitatif.	<i>Stakeholder</i> dalam pengembangan Agrowisata Minapadi Semberembe terdiri dari 19 <i>Stakeholder</i> yang kemudian dibagi dalam empat kelompok yang terbagi menjadi 4 kelompok: Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dna	Penelitian ini menitikberatkan pada pemetaan stakeholder dalam pengembangan agrowisata dan konversi lahan pertanian, sementara penelitian penulis berfokus pada pengelolaan RPTRA di kawasan perkotaan

		masing Stakeholder dalam upaya konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan.			Masyarakat. <i>Stakeholder</i> Kunci dalam pengembangan Agrowisata ini adalah Pemda Kab. Sleman dan masyarakat lokal seperti Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Tani, Karang Taruna, dan Poklahasar.	dengan pendekatan peran <i>stakeholders</i> dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.
3.	Joni Safaat Adiansyah, Agum Muladi, & Harry Irawan Johari, 2024	Memetakan keterlibatan dan peran <i>Stakeholder</i> dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram, serta mengidentifikasi tantangan dalam mencapai minimal 20% RTH publik sesuai peraturan.	Teori Pemetaan <i>Stakeholder</i> .	Pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan teknik Snowball Sampling.	Pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram melibatkan peranan <i>Stakeholder</i> , yaitu DLH Kota Mataram, Perkim Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, PUPR Kota Mataram, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, BKD, dan Balitbang Kota Mataram, Pokdarwis Taman Wisata Rakyat Loang Baloq, Masyarakat Kota Mataram. Namun, terdapat kendala yang	Penelitian ini mengkaji pengelolaan RTH publik secara makro untuk mencapai target luasan RTH, sedangkan penelitian penulis menelaah pengelolaan RPTRA sebagai unit mikro ruang publik, khususnya pada aspek pemeliharaan sarana dan prasarana serta koordinasi <i>stakeholders</i> .

					dihadapi dalam pengelolaan RTH Kota Mataram seperti kurangnya koordinasi antar <i>Stakeholder</i> sehingga berdampak pada belum tercapainya target minimal RTH Publik.	
4.	Ramadhani, 2024	Mengidentifikasi dan menganalisis peran berbagai stakeholder dalam mengelola ruang terbuka publik (Public Open Space) agar area tersebut dapat menjadi ruang yang aksesibel, aman, dan nyaman bagi masyarakat.	Teori Peran <i>Stakeholders</i>	Pendekatan Kualitatif Deskriptif	Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai <i>stakeholder</i> termasuk pemerintah kota, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam memastikan ruang publik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kerja sama antar stakeholder menjadi kunci dalam memberikan fasilitas yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat	Penelitian ini membahas peran stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka publik secara umum, sementara penelitian penulis secara khusus menitikberatkan pada RPTRA sebagai ruang publik ramah anak serta kesenjangan antara peran normatif dan praktik pengelolaan sarana dan prasarana.

5.	Sherlyta Seftiandy, 2021	Menganalisis pengelolaan ruang publik di M Bloc Space melalui tinjauan peran manajerial dan peran <i>Stakeholder</i> primer.	Teori Analisis <i>Stakeholder</i> menurut Freeman (1984).	Pendekatan Kualitatif Deskriptif.	Pengelolaan di M Bloc Space yang dilakukan oleh <i>Stakeholder</i> dikelompokkan menjadi tiga, yaitu primer, pendukung, dan kunci. <i>Stakeholder</i> primer meliputi para <i>founder</i> yang berperan sebagai pengambilan keputusan dan arah kebijakan sekaligus pemilik saham. <i>Stakeholder</i> pendukung adalah lembaga pemerintah dan untuk <i>Stakeholder</i> kunci adalah PERURI sebagai pemilik aset lahan.	Penelitian ini mengkaji pengelolaan ruang publik berbasis manajemen swasta (M Bloc Space), sedangkan penelitian penulis berfokus pada ruang publik yang dikelola pemerintah daerah, yaitu RPTRA, dengan kompleksitas birokrasi dan multi- <i>stakeholders</i> .
6.	Priska Grace Filia, Laila Khalid Aldirdaus, 2024	Menganalisis peran serta relasi <i>Stakeholder</i> dalam program CSR BUMN Balkondes (Balai Ekonomi Desa) di Kecamatan Borobudur,	Teori <i>Stakeholder</i> menurut Freeman (1984).	Pendekatan Kualitatif Deskriptif.	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam program CSR BUMN Balkondes meliputi: Kementerian BUMN dan Pemerintah Desa sebagai <i>Stakeholder</i> primer. Lalu, masyarakat desa sebagai <i>Stakeholder</i> sekunder, dan terakhir	Penelitian ini menelaah relasi <i>stakeholder</i> dalam program CSR berbasis desa, sedangkan penelitian penulis mengkaji pengelolaan fasilitas publik perkotaan dengan fokus pada peran pemerintah dan

		Kabupaten Magelang.			BUMN Sponsor dan BUMN Pendamping (PT Manajemen CBT Nusantara) sebagai <i>Stakeholder</i> tersier. Adanya relasi kooperatif atau kolaboratif yang terjadi antara Kementerian BUMN, BUMN Sponsor, Pemerintah daerah, dan masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program CSR BUMN Balkondes.	stakeholder lokal dalam pemeliharaan sarana dan prasarana RPTRA.
7.	Vinka Widia Pamela, Desiderius Priyo Sudibyo - 2024	Menganalisis peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Magelang	Teori Peran Stakeholder Thompson, 2011; Gardner et al., 2009)	Pendekatan Kualitatif Deskriptif.	Terdapat 5 pemangku kepentingan yang tersebar di empat kuadran (key player, subject, context setter, crowd). Keberhasilan Kota Magelang meraih predikat KLA disimpulkan karena peran aktif dan	Penelitian ini berfokus pada peran <i>stakeholders</i> dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak secara umum, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji implementasi konsep Kota Layak Anak melalui

					kolaborasi para stakeholder di tiap indikator KLA..	pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA di tingkat tapak.
8.	M. Subhan, Zulkarnaini, Geovani Meiwanda, Risky Arya Putri	Menganalisis peran dan hubungan antar <i>Stakeholder</i> dalam pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan melalui Program Siak Hijau	Teori Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder) menurut Reed (2009)	Pendekatan Kualitatif.	Terdapat tujuh <i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan Program Siak Hijau yang terdiri dari DLH & BPBD (kunci), Bupati, BAPPEDA, Sedagho Siak (utama), pihak konsesi & masyarakat (pendukung). Hubungan antar <i>Stakeholder</i> umumnya baik dan tanpa konflik. Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan antara lain, kualitas SDM dan ketersediaan anggaran.	Penelitian ini membahas pengelolaan sumber daya alam melalui program lingkungan, sementara penelitian penulis berfokus pada pengelolaan ruang publik ramah anak dengan penekanan pada koordinasi dan integrasi peran <i>stakeholders</i> dalam konteks perkotaan.
9.	Verilya Veriyani, Bagas Narendra Parahitam dan Yosafat Hermawan	Menganalisis kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> dalam pembentukan dan pengembangan ruang publik	Teori Stakeholder menurut Freeman	Pendekatan Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus.	Pembentukan Taman Jogo Kali dipelopori oleh masyarakat RW 9 Pucangsawit bersama mantan Wali Kota Surakarta dengan	Penelitian ini menitikberatkan pada kolaborasi stakeholder dalam pembentukan ruang publik baru, sedangkan penelitian

	Trinugraha, 2023	Taman Sunan Jogo Kali di Kota Surakarta.			dukungan pemda dan pihak swasta/CSR, yaitu PLN, Bank Jateng, Le Mineral, Ide Express, Bank Solo. Hasil kolaborasi ini berhasil meningkatkan fasilitas taman seperti mushola, toilet, panggung, area UMKM, serta perahu wisata.	penulis mengkaji pengelolaan dan pemeliharaan RPTRA yang telah beroperasi, khususnya terkait keberlanjutan sarana dan prasarana.
10	R. Rijanta, 2015	Mengetahui kontribusi pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk pemerintah dan komunitas dalam penataan kawasan waterfront yang sekaligus berfungsi sebagai ruang publik kota.	Teori Stakeholder Role	Pendekatan Kualitatif Deskriptif	Ditemukan bahwa pemerintah lebih dominan dalam pelaksanaan penataan ruang, namun keterlibatan masyarakat dan sektor swasta mendukung fungsi sosial ruang publik waterfront tersebut.	Penelitian ini mengkaji penataan kawasan waterfront secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas pengelolaan RPTRA sebagai ruang publik ramah anak dengan fokus pada kesenjangan peran stakeholders dalam pengelolaan sarana dan prasarana.

Sumber : Diolah dan dianalisis berbagai Artikel Jurnal oleh Peneliti (2025)

1.6.2. Kerangka Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Manusia dalam administrasi memiliki peran sebagai subyek dan obyek, manusia sebagai subyek berarti bahwa manusia memiliki tugas untuk melayani dan manusia sebagai obyek berarti manusia merupakan obyek yang harus dilayani. Manusia berperilaku melayani dan mengatur dirinya untuk agar bisa tetap hidup dan untuk mencapai tujuan hidupnya, perilaku ini dimulai pada saat seseorang masih berada di tingkatan individu sampai manusia tersebut berada di tingkat sosial (Pasolong, 2013). Keberadaan administrasi untuk digunakan oleh manusia untuk memenuhi kepentingan manusia, khususnya berkaitan dengan keberadaannya manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan (Siagian, 2008).

Menurut Ibrahim (2007) administrasi publik merupakan cara yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah yang mengikutsertakan adanya kegiatan manajemen yang terdiri dari perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan dengan tata kerja dan sumber daya manusia. Dimock (1992) juga mengatakan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari keinginan masyarakat yang disalurkan oleh pemerintah selain itu, dalam administrasi publik juga membahas mengenai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keinginan tersebut.

Ruang lingkup administrasi publik tidak hanya sebatas mengenai hal-hal yang dilakukan pemerintah, tetapi administrasi publik juga mencakup keseluruhan proses kegiatan yang diawali dari penentuan tujuan hingga tahap akhir, yaitu penyelenggaraan menuju sasaran sesuai yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik tersebut, terdapat mekanisme kolaboratif yang dibangun oleh sejumlah individu dalam menjalankan fungsi pemerintahan, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan publik secara tepat dan terukur.

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup kajian Administrasi Publik karena membahas proses tata kelola pelayanan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang publik. Melalui pendekatan *Stakeholder mapping*, penelitian ini mengkaji dinamika, peran, pengaruh, dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan RPTRA Kalijodo sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik berbasis kolaborasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *governance* dalam Administrasi Publik yang menekankan pentingnya keterlibatan multi-aktor dalam mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Pada studi ilmu administrasi publik terdapat cara pandang atau pendekatan yang dikenal sebagai paradigma. Paradigma ini akan terus bertransformasi seiring dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. yang memengaruhinya dari waktu ke waktu. Menurut Nicholas Henry, terdapat enam paradigma administrasi publik, yaitu

Paradigma pertama, *The Politics-Administration Dichotomy* (1900-1926) dikenal sebagai Dikotomi Politik-Administrasi yakni, adanya pemisahan antara politik dengan fungsi pemerintahan merupakan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Menurut Woodrow Wilson (1987) bahwa agar administrasi publik berjalan efektif terdapat syarat-syarat yang terdiri dari adanya pembedaan yang jelas antara politik dengan administrasi.

Paradigma kedua, *The Principles of Administration* (1927-1937) dikenal sebagai era prinsip-prinsip administrasi. Paradigma ini juga dikenal dengan tujuh prinsip administrasi yaitu, *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting* (Gulick dan Urwick, 1937). Karakteristik utama pada paradigma ini adalah menekankan efisiensi dan ekonomi sebagai nilai utama dalam administrasi.

Paradigma ketiga, *Public Administration as Political Science* (1950-1970) dikenal juga dengan pandangan bahwa administrasi publik dikenal sebagai ilmu politik (Henry, 2007). Paradigma ini berpandangan bahwa ilmu politik sebagai induk administrasi publik dan administrasi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses politik.

Paradigma keempat, *Public Administration as Management* (1956-1970) dikenal dengan administrasi publik sebagai manajemen. Paradigma ini melihat bahwa administrasi publik perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Selain itu, administrasi publik

juga dilihat sebagai sebuah ilmu manajemen yang berfokus pada pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik.

Paradigma kelima, *Public Administration as Public Administration* (1970-sekarang). Fokus administrasi publik pun berubah dari hierarki dan birokrasi menuju pendekatan yang berbasis pasar dan organisasi sektor swasta. Paradigma ini mentransformasikan pengelolaan sektor publik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis dari sektor swasta.

Paradigma keenam, *Governance* (1990-sekarang) *Governance* adalah seperangkat aturan, struktur, dan prosedur yang memberikan kewenangan kepada pemangku kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan. *Governance* banyak melibatkan pihak-pihak lain untuk bekerjasama dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pihak-pihak tersebut seperti penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta (Gibson, 2011). Fokus dari *governance* adalah peranan dari pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks karena tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018).

Penelitian ini masuk pada paradigma *governance* yang mengkaji keterlibatan berbagai aktor non-pemerintah dalam proses pengelolaan ruang publik. Paradigma *governance* menekankan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pendekatan *Stakeholder mapping*, penelitian ini menganalisis distribusi kekuasaan, kepentingan, serta tingkat partisipasi aktor-aktor tersebut membentuk dinamika tata kelola RPTRA

Kalijodo. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ruang publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi sejauh mana kolaborasi lintas aktor dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

1.6.2.3 Manajemen Publik

Manajemen merupakan upaya pemberian petunjuk arahan yang melalui perencanaan, koordinasi, pengintegrasian, pembagian tugas, dan proposional, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada (manusia, material, modal) guna untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus maupun umum yang telah disepakati bersama. (Abd. Rohman., 2018). Manajemen publik merupakan proses dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam mengelola urusan sosial dan publik guna memastikan distribusi yang efektif dan adil mengenai kepentingan publik. Manajemen publik mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan pemerintahan melalui fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan publik terlaksana serta pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara efektif dan bertanggung jawab.

Manajemen terdiri dari elemen-elemen pokok yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan guna menyempurnakan manajemen. Menurut John F dan Presthus Robert V (1960) bahwa manajemen terdiri dari lima unsur pokok yang meliputi: *Men* (Manusia), *Money* (Uang), *Materials* (Material), *Machines* (Mesin), *Methods* (Metode). Fungsi-fungsi manajemen yang lebih dikenal dengan POAC

oleh George R. Terry (1964) yaitu, *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengaktualisasian), *controlling* (pengawasan).

1.6.2.4 Stakeholder

Definisi *Stakeholder* menurut Freeman (1984) adalah pihak yang dapat menjadi sasaran dari dampak suatu kebijakan dan pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan. Clarkson (1995) mendefinisikan *stakholder* sebagai orang-orang atau kelompok yang memiliki, atau mengklaim, kepemilikan, hak, atau kepentingan dalam suatu perusahaan dan aktivitasnya, pada masa lampau, sekarang, atau masa depan. Pada konteks kebijakan publik, Crosby (1992) mendefinisikan *Stakeholder* sebagai individu dan organisasi yang secara aktif terlibat dalam program atau mereka yang kepentingannya dapat terpengaruh secara positif maupun negatif sebagai hasil dari pelaksanaan atau penyelesaian program. Keterlibatan *Stakeholder* secara optimal dapat memastikan bahwa aspirasi mereka dipertimbangkan, sehingga menghasilkan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki keberlanjutan jangka panjang. Para *Stakeholder* memiliki kuasa sehingga dapat mempengaruhi struktur yang terjalin dalam sebuah kolaborasi.

Menurut Overseas Development Administration (ODA), 1995 *Stakeholder* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan peran dan kepentingannya dalam suatu kebijakan atau program, yaitu:

1. *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dan menerima dampak langsung (positif atau negatif) dari suatu kebijakan atau program keberadaannya sangat penting bagi keberlanjutan dan keberhasilan organisasi atau program.

2. *Stakeholder* Kunci

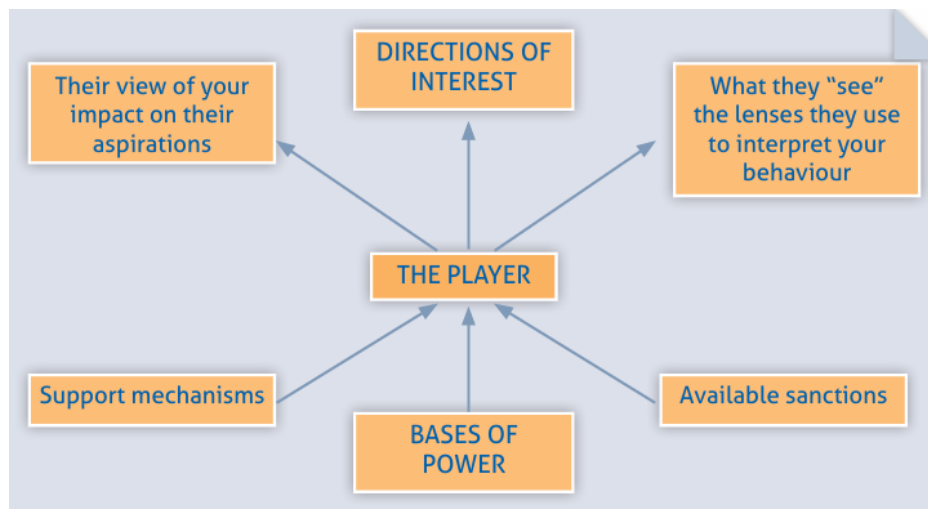
Stakeholder kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan legal, wewenang, dan sumber daya dalam pengambilan keputusan sehingga *Stakeholder* kunci memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan atau program dan memiliki pengaruh besar terhadap implementasinya.

3. *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder pendukung adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu kebijakan atau program, tetapi dapat memberikan dukungan atau pengaruh dalam pencapaian tujuan yang biasanya berperan sebagai fasilitator atau penyedia layanan pendukung.

Analisis Stakeholder Mapping dilakukan untuk mengenali pihak-pihak terkait dan menempatkannya berdasarkan besar kepentingan serta kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam konteks permasalahan atau sistem pelayanan publik (Bryson, 2004). Dengan mengetahui tingkat kepentingan masing-masing pemangku kebijakan, penetapan tujuan dasar dan tujuan utama dari kolaborasi yang dijalankan akan menjadi lebih mudah. Berikut ini beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan:

1. Based Of Power And Directions Of Interest Diagram

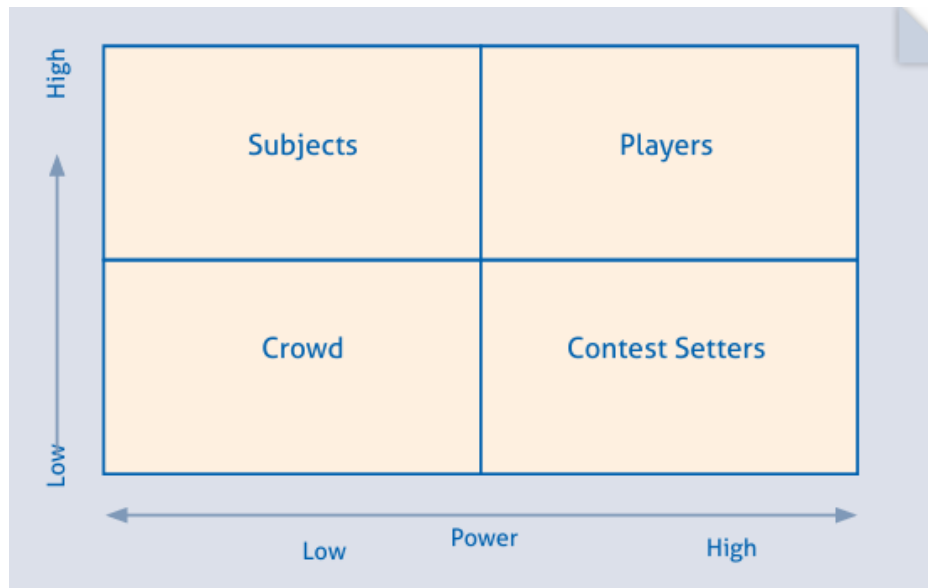


Gambar 1. 4 Based of power and direction of interest diagram (Bryson, 2004)

Sumber: <https://scottybreaksitdown.com>

Diagram tersebut dimaksudkan untuk menganalisis dasar *power* atau kekuasaan serta tujuan yang ingin diraih. *Power* dapat bersumber dari ketersediaan anggaran, pendanaan, dukungan masyarakat atau penguasaan atas berbagai bentuk pengawasan atau hukuman seperti wewenang regulasi, pemberian suara atau dukungan dilegislatif, dsb. Sedangkan, untuk *direction of interest* mengukur sejauh mana tingkat kepentingan *Stakeholder* terhadap organisasi.

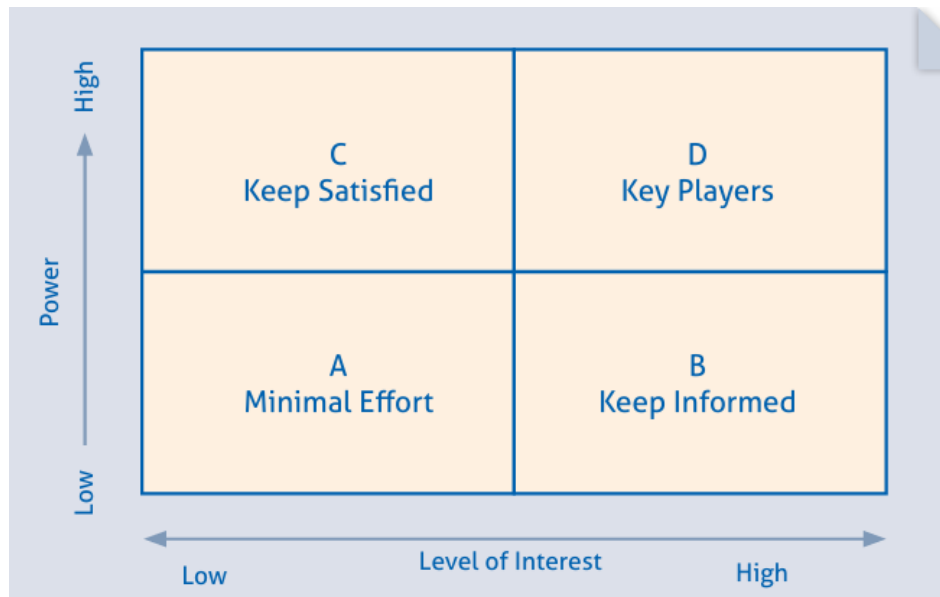
2. Power Versus Interest Grid



Gambar 1. 5 Power Versus Interest Grid (Eden & Ackermann, 1998)

Sumber: <https://scottybreaks.itdown.com>

Analisa menggunakan model grid, *power* (kekuatan) dan *interest* (kepentingan) merupakan aspek utama yang harus diperhatikan. *Power* dapat muncul dari kemampuan *Stakeholder* dalam memengaruhi kebijakan atau organisasi baik melalui otoritas formal, penguasaan sumber daya dalam organisasi, maupun pengaruh personal seperti reputasi sebagai pemimpin atau *skill* yang dimiliki. Sementara itu, tingkat *interest* (kepentingan) seorang *Stakeholder* terhadap suatu kebijakan atau program dinilai berdasarkan sejauh mana keterlibatannya. Setelah pemetaan terhadap *power* dan *interest* dari masing-masing *Stakeholder*, selanjutnya adalah menentukan bentuk intervensi serta strategi yang tepat untuk setiap *Stakeholder* yang telah dipetakan. Berikut ini gambar yang menyajikan mengenai kombinasi tingkat *power* dan *interest* yang dimiliki oleh *Stakeholder*.



Gambar 1. 6 Jenis aktor yang terlibat dalam setiap kuadran (Mintzberg, 1999)

Sumber: <https://scottybreaksitdown.com>

Keterangan:

A = *Crowd* (low power, low interest)

B = *Contest Setters* (high power, low interest)

C = *Subject* (low power, high interest)

D = *Players* (high power, high interest)

1) *Crowd* (Pendukung)

Crowd memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah dengan karakteristik tidak terdampak secara langsung dalam keputusan atau kebijakan dan jarang terlibat dalam pelaksanaan program. Namun, demikian tetap perlu dipantau jika terjadi perubahan sikap atau kondisi.

2) *Contest Setters* (Pengikut Lain)

Contest Setters memiliki pengaruh yang tinggi tetapi, kepentingan rendah dengan karakteristik dapat menjadi penentu arah kebijakan.

Cenderung pasif, tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan, dan dapat menjadi penghambat apabila kepentingannya terganggu.

3) *Subjects* (Subjek)

Subjects memiliki pengaruh yang rendah dan kepentingan yang tinggi dengan karakteristik memiliki kepedulian tinggi terhadap program, tetapi daya pengaruhnya terbatas, aktif dalam kegiatan atau terdampak langsung. Akan tetapi subjek bukan sebagai pembuat kebijakan dan dapat menjadi pendukung sosial yang kuat sebagai sumber dukungan, informasi, dan legitimasi sosial.

4) *Players* (Pemain Kunci)

Merupakan pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh yang tinggi dan kepentingan tinggi pada keberlangsungan program atau proyek. *Players* harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan karena baik dukungan maupun penolakan dapat memengaruhi keberhasilan suatu program.

Menurut Nurkhalis, Arief, & Sunarminto (2018) dalam (Ardiansyah, 2021 : 6). Untuk penilaian tingkat kepentingan dan pengaruh terdapat lima kriteria yang digunakan. Pada aspek kepentingan yang dinilai, yaitu (1) Keterlibatan, (2) Manfaat yang dituju (3) Kepentingan Sumber Daya (4) Prioritas (5) Ketergantungan Sumberdaya. Sedangkan untuk aspek pengaruh yang dinilai, yaitu (1) Aturan atau Landasan Hukum (2) Peran dan Partisipasi (3) Kemampuan dalam Berinteraksi dan pengaruh (4) Kewenangan (5) Kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Nugroho (2014) menjelaskan bahwa *Stakeholder* dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya yang terdiri dari:

1) *Policy Creator*

Merupakan pihak baik itu seseorang maupun instansi yang berperan dalam menciptakan dan menetapkan kebijakan, membuat regulasi, arah program, serta keputusan strategis.

2) Koordinator

Pihak yang memiliki peran untuk mengatur, menyelaraskan, dan menjembatani berbagai pihak agar tujuan tercapai serta mengkoordinasikan antar *Stakeholder* yang terlibat. Dalam hal ini koordinasi yang dimaksudkan adalah dengan mengarahkan, mengintegrasikan unsur-unsur pengelolaan dan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Fasilitator

Pihak yang menyediakan dukungan, sumber daya, fasilitas atau pemenuhan kebutuhan dari kelompok yang dituju. Selain itu, adanya fasilitator juga menjadi sebuah pemandu dalam kegiatan yang sedang dijalankan sehingga mempermudah proses suatu kegiatan dalam keberjalanan kegiatan.

4) Implementor

Pihak baik itu individu, pemerintah maupun swasta yang melaksanakan langsung kebijakan/program sesuai dengan peran atau tugasnya untuk mencapai suatu tujuan.

5) Akselerator

Pihak yang mempercepat, memperkuat, atau memberi kontribusi tambahan agar program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan program lebih cepat selesai dari waktu yang telah direncanakan.

1.6.2.5 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau perantara untuk mencapai suatu tujuan sedangkan pengertian dari prasarana adalah segala sesuatu yang berperan penting dalam mendukung keberlangsungan suatu kegiatan agar proses kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut Bafadal (2004) pengelolaan sarana dan prasarana adalah suatu proses kerja sama individu maupun kelompok untuk merencanakan, mengadakan, memelihara, serta mendayagunakan sarana dan prasarana dengan tepat sehingga dapat memberikan dukungan optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Adanya pengelolaan sarana dan prasarana pada suatu kegiatan dapat mencegah suatu fasilitas disalahgunakan atau tidak terpakai. Melalui pengelolaan, setiap fasilitas yang dikelola dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, pemeliharaan yang dilakukan secara rutin membuat fasilitas bertahan lebih lama sehingga dapat mengurangi biaya perbaikan besar, dan menjamin keamanan setiap pengunjung yang menggunakan fasilitas.

1.6.2.6 Ruang Publik Terpadu Anak (RPTRA)

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak bahwa Ruang Publik Terpadu Anak (RPTRA) merupakan tempat atau ruang terbuka yang memadukan berbagai kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Kota Layak Anak. Fungsi dari adanya RPTRA ini sebagai (a) Taman terbuka untuk publik; (b) Tempat untuk berinteraksi berbagai kalangan masyarakat; (c) Dalam rangka pemenuhan prasarana dan sarana bagi hak anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; (d) Bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak (KLA); (e) Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tempat penyerapan air tanah; (f) Sebagai prasarana dan sarana untuk kegiatan sosial warga termasuk kegiatan pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan Kader PKK; (g) Sebagai tempat untuk meningkatkan pendapatan keluarga; (h) Tempat yang digunakan sebagai pusat informasi dan keluarga; (i) Sebagai halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman; dan (j) Sistem Informasi Manajemen.

RPTRA hadir sebagai solusi inovatif yang tidak hanya menyediakan ruang fisik bagi anak-anak untuk bermain dan bersosialisasi, namun juga dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan terpadu yang mencakup berbagai aspek pemenuhan hak anak, seperti:

1. Pemenuhan hak anak atas pendidikan non-formal melalui berbagai kegiatan edukasi.

2. Pemenuhan hak anak atas kesehatan melalui fasilitas dan program kesehatan.
3. Pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan melalui lingkungan yang aman.
4. Pemenuhan hak anak atas partisipasi dalam pembangunan melalui forum anak.
5. Pemenuhan hak anak atas rekreasi dan bermain melalui fasilitas bermain yang memadai.

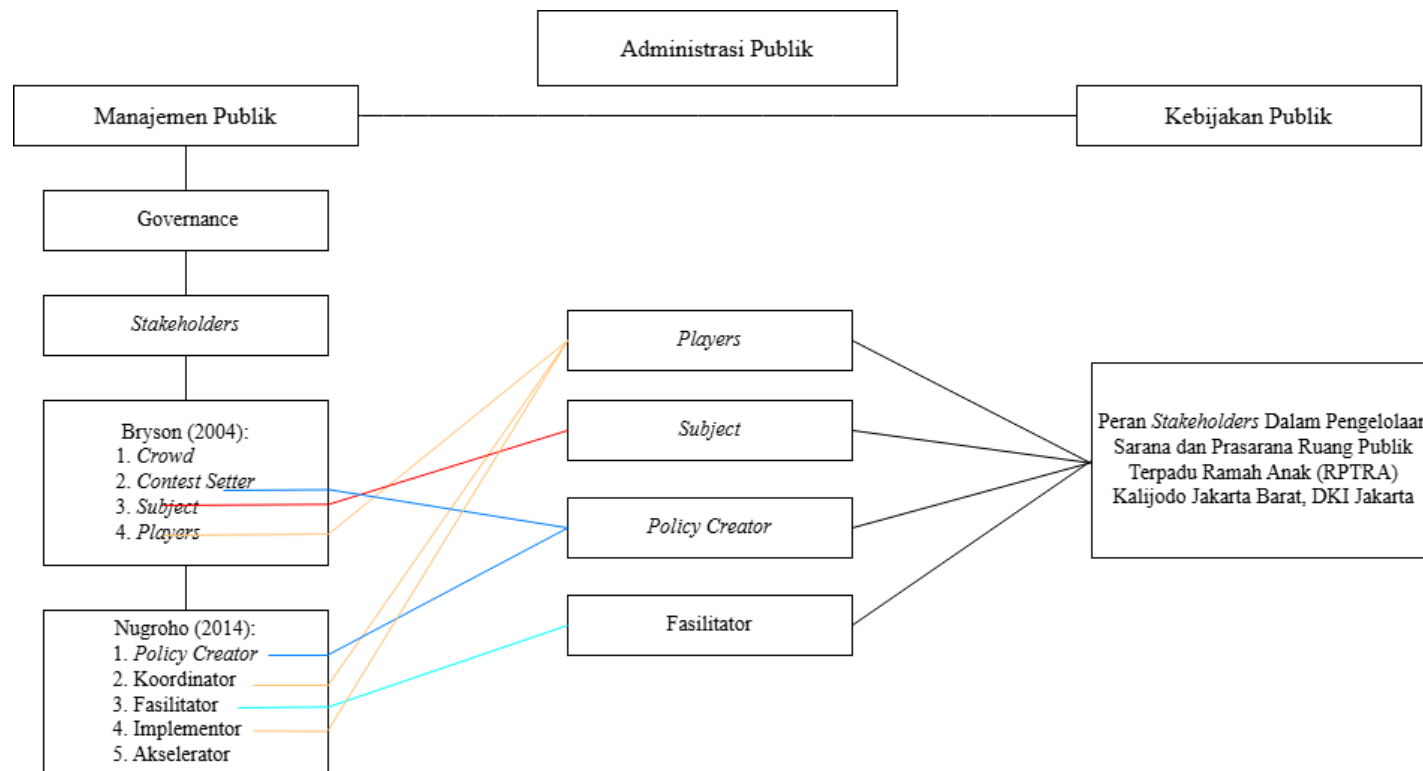
RPTRA sebagai ruang publik tidak hanya digunakan untuk anak-anak saja namun, juga dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Layanan anak yang terdapat pada RPTRA terdiri dari Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), posyandu, perpustakaan anak, dan tempat kegiatan kreatif anak seperti tempat berolahraga dan tempat bermain anak. Sedangkan untuk layanan kepada masyarakat, RPTRA juga menyediakan kegiatan seperti, kegiatan sepuluh program pokok PKK, PKK-MART, olahraga, dan kegiatan kesenian. RPTRA juga dapat digunakan sebagai layanan kebencanaan yang terdiri dari pemberian informasi edukasi bencana, rambu bencana, dan dapat digunakan sebagai tempat pengungsian sementara pasca bencana.

RPTRA dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung perkembangan anak, kenyamanan orang tua, serta dapat digunakan sebagai tempat untuk berinteraksi dari seluruh warga. RPTRA dirancang sebagai ruang ramah anak yang menyediakan beragam fasilitas bermain berbahan plastik dan metal dengan prioritas keamanan, mencakup perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan permainan lainnya.

Selain area bermain, tersedia lapangan futsal dan badminton untuk aktivitas olahraga anak.

Fasilitas lainnya yang terdapat pada RPTRA terdapat perpustakaan dan ruang multimedia sebagai tempat belajar anak. Fasilitas tambahan seperti wifi, PKK Mart, ruang laktasi, toilet, dan ruang serbaguna turut melengkapi sarana umum di RPTRA, menjadikannya ruang publik yang komprehensif dan fungsional. Selain itu, fasilitas yang disediakan tidak hanya ramah anak, namun juga ramah untuk penyandang disabilitas. Hingga tahun 2023 jumlah persebaran RPTRA di Provinsi DKI Jakarta mencapai 324 unit RPTRA, sebanyak 254 unit RPTRA dibangun dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara 70 unit dibangun dengan menggunakan sumbangan dana *Corporate Social University* (CSR).

1.7 Kerangka Penelitian



Gambar 1. 7 Bagan Kerangka Penelitian

Sumber : data diolah penulis (2025)

1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana RPTRA

Pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pengelolaan RPTRA adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan kawasan RPTRA yang dalam pelaksanaannya pengelola RPTRA memiliki tugas yang meliputi:

1) Pengusulan Kebutuhan dan Kegiatan RPTRA

Pengusulan kebutuhan dan kegiatan RPTRA adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh pengelola RPTRA bersama pemerintah daerah, masyarakat, atau mitra yang bekerja sama dalam menentukan jenis sarana, prasarana, serta program kegiatan yang dibutuhkan dalam RPTRA.

2) Pelaksanaan Kegiatan RPTRA

Pelaksanaan kegiatan RPTRA adalah proses aktualisasi dari rencana program yang telah disusun dan disepakati bersama untuk dilaksanakan di RPTRA.

3) Monitoring Sarana dan Prasarana RPTRA

Monitoring sarana dan prasarana RPTRA merupakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi dan pemanfaatan seluruh fasilitas yang ada di RPTRA yang dilakukan secara berkala.

4) Evaluasi Pelayanan RPTRA

Evaluasi pelayanan RPTRA adalah upaya dalam menilai RPTRA dari sisi kualitas, efektivitas dan keberlanjutan fasilitas.

5) Pemberian Informasi & Edukasi

Pemberian informasi & edukasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di RPTRA.

6) Pengkoordinasian Kegiatan Lintas Sektor

Pengkoordinasian kegiatan lintas sektor merupakan kolaborasi dari berbagai instansi, lembaga, maupun pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan di RPTRA.

1.8.2 Peran Stakeholder

Peran stakeholder adalah proses identifikasi dan pengelompokan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam suatu kebijakan atau kegiatan tertentu dengan membagi peran para pemangku kepentingan ke dalam beberapa kategori, yaitu *players*, *subject*, *policy creator*, dan fasilitator.

1) *Players*

Players merupakan pihak-pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam suatu program dan kegiatan. Selain itu, *players* juga menjadi aktor utama yang berperan aktif dalam setiap proses baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksana kebijakan.

2) *Subject*

Subject merupakan pihak-pihak yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, namun tingkat pengaruh terhadap suatu program rendah. Walaupun demikian *subject* biasanya memiliki kepedulian tinggi terhadap hasil program karena kelompok ini terdampak langsung oleh suatu kebijakan serta menjadi penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

3) *Policy Creator*

Policy creator memiliki tingkat pengaruh yang tinggi namun tingkat kepentingan yang rendah. *Policy creator* biasanya berperan dalam menetapkan arah kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan suatu program.

4) *Fasilitator*

Fasilitator merupakan kelompok yang memiliki kontribusi dalam mendukung proses keberjalanan suatu kebijakan maupun program melalui dukungan teknis, sosial maupun kemitraan.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Fenomena	Gejala
1.	Pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang pengelolaan sarana dan prasarana meliputi Pengusulan Kebutuhan dan Kegiatan RPTRA, Pelaksanaan Kegiatan RPTRA, Monitoring Sarana dan Prasarana RPTRA, Evaluasi Pelayanan RPTRA, Pemberian Informasi & Edukasi, Pengkoordinasian Kegiatan Lintas Sektor	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pengusulan Kebutuhan dan Kegiatan RPTRA
			Pelaksanaan Kegiatan RPTRA
			Monitoring Sarana dan Prasarana RPTRA
			Evaluasi Pelayanan RPTRA
			Pemberian Informasi & Edukasi
			Pengkoordinasian Kegiatan Lintas Sektor
2.	<i>Stakeholder Mapping</i> adalah proses identifikasi dan pengelompokan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam suatu kebijakan atau kegiatan tertentu dengan membagi peran para pemangku kepentingan ke dalam beberapa kategori, yaitu <i>players</i> , <i>subject</i> , <i>policy creator</i> , dan fasilitator.	2.1 <i>Players</i>	Pengusulan Kebutuhan dan Kegiatan RPTRA
		2.2 <i>Subject</i>	
		2.3 <i>Policy Creator</i>	
		2.4 Fasilitator	
		2.5 <i>Players</i>	Pelaksanaan Kegiatan RPTRA
		2.6 <i>Subject</i>	
		2.7 <i>Policy Creator</i>	
		2.8 Fasilitator	
		2.9 <i>Players</i>	Monitoring Sarana dan Prasarana RPTRA
		2.10 <i>Subject</i>	
		2.11 <i>Policy Creator</i>	
		2.12 Fasilitator	
		2.13 <i>Players</i>	Evaluasi Pelayanan RPTRA
		2.14 <i>Subject</i>	
		2.15 <i>Policy Creator</i>	
		2.16 Fasilitator	
		2.17 <i>Players</i>	Pemberian Informasi & Edukasi
		2.18 <i>Subject</i>	
		2.19 <i>Policy Creator</i>	
		2.20 Fasilitator	
		2.21 <i>Players</i>	
		2.22 <i>Subject</i>	

No	Konsep	Fenomena	Gejala
		2.23 <i>Policy Creator</i>	Pengkoordinasian Kegiatan Lintas Sektor
		2.24 Fasilitator	

1.9. Argumen Penelitian

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain anak, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan RPTRA membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kecamatan, kelurahan, pengelola, hingga masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Keberhasilan pengelolaan RPTRA tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan seperti Pergub No. 123 Tahun 2017, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana peran-peran tersebut dijalankan dan diharmonisasikan dalam praktik. Jika koordinasi tidak berjalan baik atau jika salah satu pihak tidak menjalankan perannya secara optimal, maka pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA dapat terganggu.

Hal ini menjadi indikasi bahwa diperlukan pemetaan peran *stakeholders* secara lebih mendalam untuk melihat siapa yang memiliki kepentingan dan pengaruh terbesar, siapa yang paling terdampak, serta bagaimana hubungan antar-*stakeholders* terbentuk dalam proses pengelolaan RPTRA Kalijodo. Dengan memahami aspek ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang perlu diperbaiki sehingga pengelolaan RPTRA dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.10. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam sebuah kajian ilmiah. Proses ini diawali dengan pemikiran yang menghasilkan suatu rumusan masalah yang kemudian akan memunculkan dugaan awal atau hipotesis. Dengan dukungan dan pandangan dari penelitian sebelumnya, data penelitian dapat diproses dan dikaji secara mendalam hingga akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Menurut Panjaitan & Ahmad (2017) metode penelitian adalah suatu cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Beberapa teknik metode penelitian seperti wawancara, observasi, studi literatur, kuesioner, dll. Metode penelitian membantu peneliti mengumpulkan data yang valid dan reliabel sesuai dengan kaidah ilmiah. Selain itu, metode penelitian memudahkan peneliti dalam menentukan tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian. Dengan adanya metode penelitian, capaian yang dihasilkan dari sebuah penelitian dapat diuji kebenarannya sehingga dapat memberikan *output* yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.10.1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena cocok dengan penelitian ini guna menganalisis peran dan

kepentingan para *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana RPTRA Kalijodo Jakarta Barat.

1.10.2. Lokus Penelitian

Penelitian ini berlokasi di RPTRA Kalijodo yang terletak di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. RPTRA Kalijodo dibangun pada tahun 2017 sebagai bagian dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang ramah anak dan inklusif. Area ini merupakan hasil penataan kawasan bekas lokasi Kalijodo yang kemudian dialihfungsikan menjadi ruang publik dengan berbagai fasilitas, antara lain lapangan futsal, area bermain anak, perpustakaan, sanggar, ruang serbaguna, hingga taman hijau. Sedangkan, fokus penelitian ini adalah peran *stakeholders* dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo. Penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana peran masing-masing *stakeholders* yang meliputi DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, pengelola RPTRA, serta masyarakat, MI Al-Khaeriyah, PKK Kelurahan Angke, dan Sanggar Maksima sebagai pengguna dilaksanakan dalam tahapan pengelolaan sarana dan prasarana yang terdiri dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pemberian informasi dan edukasi, hingga pengoordinasian lintas sektor.

1.10.3. Subyek Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011) *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, Teknik ini digunakan agar pengumpulan

data lebih terarah sesuai kebutuhan penelitian dengan memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan dapat dipercaya sebagai sumber informasi. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1. 4 Subjek Penelitian

No.	Informan	Populasi	Persen	Sempel	Teknik Pemilihan
1.	Lurah Kelurahan Angke	1	1%	1	Purposive Sampling
2.	Ketua Subkelompok Lembaga Kemasyarakatan Dinas PPAPP DKI Jakarta	1	1%	1	Purposive Sampling
3.	Kesatpel PPAPP Kecamatan Tambora	1	1%	1	Purposive Sampling
4.	Pengelola RPTRA	1	1%	1	Purposive Sampling
5.	Pengajar MI AL Khaeriyah	1	1%	1	Purposive Sampling
6.	Ketua TP PKK Kelurahan Angke	1	1%	1	Purposive Sampling
7.	Masyarakat Kelurahan Angke	33.619	1%	4	Accidental Sampling
8.	Ketua Sanggar Maksima	1	1%	1	Purposive Sampling

1.10.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur dengan angka secara langsung dan disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif sehingga data tersebut menggambarkan makna, pemahaman, serta pengalaman dari subjek

penelitian. Pada konteks penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi siapa *Stakeholder* yang terlibat dan menjelaskan peran kepentingan serta pengaruhnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo.

1.10.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan RPTRA Kalijodo, seperti Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK, serta masyarakat sekitar yang memiliki keterlibatan atau pengalaman langsung terhadap penggunaan fasilitas RPTRA Kalijodo. Data ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peran, pengaruh, dan kepentingan para *Stakeholder* dalam proses pengelolaan RPTRA.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kebijakan peraturan pemerintah daerah seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017, statistik dari BPS, serta referensi dari hasil penelitian terdahulu dan artikel ilmiah yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat

pemahaman teoritis dan mendukung analisis terhadap kondisi RPTRA Kalijodo secara lebih menyeluruh.

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.10.6.1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran, tugas, serta pengalaman masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo. Wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposif, yaitu individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan RPTRA Kalijodo Jakarta Barat. Informasi yang diperoleh dari wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran dan kepentingan masing-masing *stakeholders*.

1.10.6.2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo serta aktivitas pengelolaan yang berlangsung di lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi kondisi fasilitas, tingkat pemanfaatan ruang, serta bentuk pemeliharaan yang dilakukan.

1.10.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi melalui penelusuran dokumen-dokumen terkait pengelolaan RPTRA Kalijodo. Teknik dokumentasi membantu peneliti dalam memverifikasi informasi dan memperkuat keabsahan data penelitian.

1.10.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2017) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam satuan, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut memiliki aspek penting yang sama, yaitu proses analisisnya sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengintegrasikan serta menafsirkan informasi. Interpretasi menjadi hal yang diperlukan hal ini dikarenakan data yang sudah diperoleh umumnya bukan berupa angka melainkan deskriptif dan lebih mendetail.

2. Kondensasi Data

Tahapan ini merujuk kepada proses memilah, menyusun ulang, merangkum, hingga mengubah data yang diperoleh dari catatan lapangan maupun transkrip wawancara menjadi informasi yang lebih terarah.

3. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (1992), penyajian data merupakan rangkaian informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan maupun menentukan langkah yang perlu ditempuh. Adanya penyajian data ini, dapat membuat peneliti lebih memahami situasi penelitian dengan lebih jelas.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Proses menyusun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dengan merujuk pada data wawancara dan dokumentasi. Data awal yang ada akan melalui proses reduksi dan penyajian, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih valid.

1.10.8. Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin kualitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebenaran data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian. Manfaat dari penerapan triangulasi adalah untuk mengidentifikasi data yang diperoleh bersifat meluas (*convergent*), inkonsisten, atau bahkan saling bertentangan. Selain itu, dengan menerapkan

triangulasi dalam beberapa bentuk, peneliti berupaya untuk menjaga kredibilitas, terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian. Triangulasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memverifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan data melalui perbandingan informasi dari beberapa narasumber yang berbeda. Proses ini membantu meningkatkan kredibilitas data karena peneliti tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang, melainkan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memverifikasi kebenaran data dari sumber yang sama menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk menguji tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh sehingga peneliti dapat menilai konsistensi jawaban dan menghindari bias dalam mencari data.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan yang sama namun dalam waktu atau situasi yang berbeda. Pada teknik ini diyakini bahwa kondisi psikologis atau lingkungan pada waktu tertentu dapat mempengaruhi kualitas data yang diberikan oleh informan. Oleh

karena itu, pengumpulan data pada waktu yang bervariasi dapat meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai informan dengan posisi dan peran berbeda dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari informan yang berbeda guna menguji konsistensi informasi.